



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
KOTA MADIUN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan atas ijin-Nya Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun telah selesai kami susun.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Madiun didasarkan pada visi, misi, tujuan serta tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan komitmen bersama.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Tahun 2026 dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan untuk turut mensukseskan program-program pembangunan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Madiun.

Madiun, Januari 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



Drs. H. HARIS RAHMANUDIN

Pejabat Utama Muda

NIP. 19660813 199203 1 009

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah...	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	44
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah...	45
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	46
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	57
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	57
BAB V : PENUTUP	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4. Pohon Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia 32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja	7
Tabel 2.2.	Jenis Pelayanan dan Program Pengampu	14
Tabel 2.2.1.	Pencapaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20
Tabel 2.2.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembang Sumber Daya Manusia	23
Tabel 2.3.	Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28
Tabel 2.3.1.	Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun	29
Tabel 2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Madiun	33
Tabel 2.5.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Madiun	39
Tabel 3.1.	Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026	46
Tabel 3.2.	Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian Target Kota Madiun	48
Tabel 3.3.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 kota Madiun	53
Tabel 4.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 Kota Madiun	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan yang dibuat setiap tahun sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan atau biasa disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), penyusunan Renja PD tidak lepas dari peran stakeholder serta pemangku kepentingan dalam penyusunan serta beberapa tahapan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat 2 yang dimulai dari tahapan :

- a. Persiapan penyusunan.
- b. Penyusunan rancangan awal.
 - penyusunan dilakukan paling lambat minggu pertama bulan desember (n-2) dengan berpedoman pada Renstra PD dan Hasil Evaluasi Renja PD tahun lalu.
 - penyempurnaan rancangan awal berpedoman pada Surat Edaran Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah.
- c. Penyusunan rancangan.
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;
 - dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah Surat Edaran Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- e. Perumusan rancangan akhir. dan
- f. Penetapan
 - ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan merupakan potret dari Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah yang telah disampaikan melalui berbagai tahapan dan telah dirumuskan untuk mendukung kebijakan kepala daerah, menampung usulan masyarakat dan stakeholder, selain itu Renja Perangkat Daerah yang disusun juga telah mengakomodir dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga sebagai

bagian dari kewenangan serta tugas dan tupoksi Perangkat Daerah dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah secara normatif memuat dasar hukum sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian/Lembaga terkait:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
- p. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020
- q. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
- r. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
- s. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- t. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026
- u. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026
- v. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- w. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026
- x. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor tahun 2025 tentang Rencana Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Memberikan gambaran Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024

2. Memberikan gambaran rencana kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2026
3. Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan serta tolok ukur dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah

1. sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Perangkat Daerah yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai tujuan pembangunan.
2. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai usulan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai berikut :

Penetapan Renja Oleh Kepala Perangkat Daerah

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sejauh mana keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan organisasi, selain itu mengidentifikasi faktor penghambat dan mencari solusi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Evaluasi Pelaksanaan renja tahun lalu memberikan gambaran atau potret kinerja serta keselarasan dalam mencapai target kinerja perencanaan strategis.

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2024
Kota Madiun

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN KEPEGAWAIAN									
5.3	KEPEGAWAIAN									
5.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	86	85	86	86	100	86	257	64.25
5.3.1.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	300	75
5.3.1.2.01.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	5 Dokumen	6	5	5	100	5	16	4

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
5.3.1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	300	75	
5.3.1.2.02.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	45 Orang	41	45	45	100	45	131	32.75	
5.3.1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100	100%	300	75	
5.3.1.2.06.9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	85 Laporan	85	85	85	100	85	255	63.75	
5.3.1.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	-	100%	100%	100	100%	200	50	
5.3.1.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 unit	-	2	2	100	5	7	1.74	
5.3.1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	100%	100%	100	100%	300	75	
5.3.1.2.08.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Laporan	18	12	12	100	12	42	10.5	

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

		yang disediakan								
5.3.1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	300	75
5.3.1.2.09.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18 Unit	19	18	18	100	18	55	13.75
5.3.1.2.09.9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	2	2	2	100	2	6	1.5
5.3.1.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 unit	8	8	8	100	8	24	6
5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai IKM	87.86	87	87.86	87.86	100	87.86	262.842	65.605
5.3.2.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Data	100%	100%	100%	100%	100	100%	300	75
5.3.2.2.01.4	Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil, evaluasi pengadaan ASN	1 Laporan	2	2	2	100	1	5	1.25
5.3.2.2.01.6	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	225 Dokumen	212	160	160	100	225	597	149.25
5.3.2.2.01.11	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	3036 Dokumen	3000	1000	1000	100	3036	7036	1.759
5.3.2.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100	100%	300	75

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

		administrasi Mutasi dan Promosi								
5.3.2.2.02.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar Daerah	702 Dokumen	209	702	702	100	702	1613	403.25
5.3.2.2.02.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	455 Dokumen	455	455	455	100	455	1365	341.25
5.3.2.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Prosentase Pengembangan Kompetensi ASN	100%	100%	100%	100%	100	100%	300	75
5.3.2.2.03.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	150 Dokumen	150	110	110	100	50	310	77.5
5.3.2.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Realisasi Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%	100%	100	100%	300	75
5.3.2.2.04.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1	1	1	100	2	4	1
5.3.2.2.04.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	1429 Dokumen	1429	1429	1429	100	200	3058	13.75
5.3.2.2.04.7	Sub Kegiatan Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60 Orang	60	60	60	100	60	180	45
5.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan SDM	20%	15	20	20	100	20	55	275
5.4.2.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Realisasi Pengembangan kompetensi teknis	85%	85	85	85	100	85	255	63.75
5.4.2.2.01.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	277	277	277	277	100	232	786	196.5

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

	Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
5.4.2.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	80%	80	80	80	100	80	240	60	
5.4.2.2.02.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	277	177	277	277	100	186	640	160	

Berdasarkan tabel capaian kinerja renstra diatas terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan situasi serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian Perangkat Daerah yaitu :

1. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
Semua Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sudah memenuhi target kinerja.
2. Realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan :
 - a. Program
 1. Kepegawaian Daerah
 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Kegiatan
 1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.
 2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.
 3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 5. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 6. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - c. Sub Kegiatan
 1. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian.
 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian.
 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
 4. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 5. Sub Kegiatan Pengelolaan Assesment Center
 6. Sub Kegiatan Pembinaan disiplin ASN
 7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 - d. Faktor pendorong

1. Untuk Sub Kegiatan administrasi Pemberhentian karena adanya sosialisasi untuk ASN yang pensiun, terkumpulnya data ASN yang pensiun tepat waktu.
2. Untuk Sub Kegiatan Pengelolaan data Kepegawaian adanya pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang memberikan informasi mengenai kepegawaian data kepegawaian yang mutakhir dilingkup Kota Madiun.
3. Untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN Penempatan Pegawai dalam Jabatan sesuai dengan SKJ atau sesuai Kompetensi.
4. Untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN faktor pendorong antara lain Kompetensi pegawai, Sistem prosedur, pendidikan dan pengalaman, pemeriksa berkas dari BKPSDM harus didukung oleh jumlah kelengkapan seperti komputer dan printer masing-masing.
5. Untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Assesment Center faktor pendorong antara lain komitmen Pemerintah daerah untuk menggunakan Sistem Merit dalam sub kegiatan ini, meningkatkan kualitas kepegawaian melalui penataan pegawai sesuai kebutuhan formasi.
6. Untuk Sub Kegiatan Pembinaan disiplin ASN semakin turun persentase pelanggaran disiplin semakin bagus adapun faktor yang mempengaruhi atau faktor pendorong karena ASN sudah cukup memahami aturan tentang akibat atau sangsi-sangsi dari pelanggaran disiplin dan adanya pelaksanaan pembinaan pegawai yang kontinu, sehingga dapat mengurangi output sub kegiatan.
7. Untuk Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum faktor pendorongnya antara lain meningkatnya kualitas kepegawaian melalui penataan pegawai sesuai kebutuhan formasi dan kompetensi jabatan dengan dukungan dokumen hasil assesment pegawai, peningkatan kompetensi sumber daya aparatur daerah melalui tugas belajar, diklat struktur serta diklat teknis dan fungsional.
8. Untuk Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan faktor yang mendorong adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan dibidang

administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akurat dengan mengoptimalkan Sistem Informasi Kepegawaian.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian renstra perangkat daerah :

a. Program yang tidak tercapai/ memenuhi target

i. Program Kepegawaian Daerah

Program ini memenuhi target bahkan bisa melebihi target

ii. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini memenuhi target bahkan bisa melebihi target

b. Program yang memenuhi atau melebihi target

i. Program Kepegawaian Daerah

Program ini sudah memenuhi target kinerja bahkan melebihi target

ii. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini sudah memenuhi target kinerja bahkan melebihi target

4. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab :

a. tidak tercapainya/tidak memenuhi target kinerja

Seluruh target kinerja sudah memenuhi target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur di lingkungan pemerintah Kota Madiun, maka program dan kegiataannya didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BKPSDM, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya, mewujudkan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan akuntabel.

Tabel 2.2
Jenis Pelayanan dan Program Pengampu
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Madiun

No	Jenis Pelayanan	Program	Keterangan
1	Pelayanan Penanganan Pengaduan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Manual

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

2	Pelayanan Legalisir	Program Kepegawaian	Manual
3	Pelayanan Pemrosesan Cuti Pegawai	Program Kepegawaian	Manual
4	Pelayanan Penjatuhan Hukuman Disiplin	Program Kepegawaian	Manual
5	Pelayanan Pembuatan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU)	Program Kepegawaian	Manual
6	Pelayanan Permohonan Izin Perkawinan dan Pembinaan Pra Nikah/Pasca Nikah	Program Kepegawaian	Manual
7	Pelayanan Permohonan Izin Perceraian	Program Kepegawaian	Manual
8	Pelayanan Pengajuan Tunjangan Istri/Suami dan Pendaftaran anak	Penunjang Urusan Pemerintahan	Manual
9	Pelayanan Seleksi Penerimaan CPNS	Program Kepegawaian	melalui sscasn.go.id
10	Pelayanan Permintaan Data Pegawai	Program Kepegawaian	Manual
11	Pelayanan Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. IV/C ke Atas	Program Kepegawaian	Aplikasi Simpeg dan Aplikasi SIASN BKN
12	Pelayanan Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. IV/a-IV/b	Program Kepegawaian	Aplikasi Simpeg dan Aplikasi SIASN
13	Pelayanan Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan III/d kebawah	Program Kepegawaian	Aplikasi Simpeg dan Aplikasi SIASN
14	Pelayanan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS	Program Kepegawaian	Aplikasi Simpeg
15	Pelayanan Penetapan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional	Program Kepegawaian	Manual
16	Pelayanan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS	Program Kepegawaian	Manual
17	Pelayanan Penetapan Peninjauan Masa Kerja PNS	Program Kepegawaian	Manual
18	Pelayanan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/c ke Atas	Program Kepegawaian	Aplikasi SIASN
19	Pelayanan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/b ke bawah	Program Kepegawaian	Aplikasi SIASN
20	Pelayanan Permohonan Pindah Antar Wilayah	Program Kepegawaian	Manual

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

	(PAW)		
21	Pelayanan Permohonan Izin Belajar	Program Pengembangan SDM	Aplikasi SIMPEG
22	Pelayanan Permohonan Tugas Belajar	Program Pengembangan SDM	Aplikasi SIKD
23	Pelayanan Sewa Gedung Diklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Melalui situs https://gedungdiklat.madiunkota.go.id/ atau melalui website https://bkpsdm.madiunkota.go.id/
24	Pelayanan Penghargaan Satya Lancana	Program Kepegawaian	Aplikasi Simpeg Aplikasi Kemendagri
25	Pelayanan Permohonan Ijin Keluar Negeri	Program Kepegawaian	Manual
26	Permohonan Mengikuti Diklat Teknis keluar Daerah	Program Pengembangan SDM	Manual
27	Pelayanan Perpanjangan Masa Kerja tenaga Kontrak Kerja	Program Kepegawaian	Manual

Indikator yang menjadi Tolok ukur perangkat daerah yang tertuang dalam renstra perangkat daerah meliputi :

1. Indikator Tujuan Perangkat Daerah

a. Indeks NSPK

Penilaian **Indeks** Implementasi **NSPK** Manajemen ASN merupakan keseluruhan proses penilaian terhadap implementasi Manajemen ASN pada instansi pemerintah yang disesuaikan dengan elemen dan indikator yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dokumen yang dipersyaratkan. Sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 800-401.201/89/2021 tentang Pembentukan Tim Indeks Implementasi Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik

serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan penilaian indeks implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil negara.

b. Rumus Perhitungan

Hasil didapatkan dari skor perhitungan Penilaian dari BKN.

2. Indikator Sasaran Perangkat Daerah

a. Penjelasan Sasaran

1. Sistem Merit

Penjelasan Definisi dari Sistem Merit Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Sebagai penjabaran agenda Prioritas RPJMN 2020-2024, penerapan sistem merit ditetapkan sebagai satu dari tiga program prioritas bidang aparatur dalam RKP 2020, yaitu (1) Peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan reformasi birokrasi; (2) Peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik; dan (3) Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Penjelasan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan *masyarakat* yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat *masyarakat* dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

3. Persentase Peningkatan Kualitas ASN

Untuk meningkatkan kualitas ASN maka perlu adanya pelatihan atau pengembangan kompetensi.

4. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang melakukan penilaian terhadap 6 (enam) aspek yaitu : 1. Kebijakan Pelayanan; 2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia; 3. Sarana dan

Prasarana; 4. Sistem informasi pelayanan publik; 5. Konsultasi pengaduan; 6. Inovasi

b. Rumus Perhitungan

1. Hasil didapatkan dari skor perhitungan Penilaian dari Instansi Vertikal yaitu KASN
2. Indeks Kepuasan Masyarakat survey pihak ketiga
3. Jumlah ASN mengikuti peningkatan kualifikasi kompetensi dibagi jumlah ASN X 100
4. Survey

3. Indikator Program Perangkat Daerah

a. Penjelasan

1. Nilai SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Adapun penilaian dalam SAKIP antara lain : Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

2. Persentase administrasi Kepegawaian yang terselesaikan
Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan adalah untuk mengetahui capaian penyelesaian kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam bidang urusan urusan kepegawaian.
3. Persentase realisasi pengembangan SDM adalah untuk meningkatkan SDM yang berkualitas harus diadakan pendidikan yang lebih tinggi, pelatihan, bimtek, serta kegiatan pengembangan kompetensi lainnya.

b. Rumus Perhitungan

1. Hasil penilaian atau skor Penilaian diperoleh dari Tim SAKIP Tingkat Kota Madiun serta reuiu dari Inspektorat Kota Madiun.
2. Kegiatan urusan kepegawaian yang terselesaikan dibagi kegiatan urusan kepegawaian yang harus dilaksanakan x 100%

3. Kegiatan pengembangan SDM yang terselesaikan dibagi kegiatan pengembangan SDM yang harus dilaksanakan x 100%.
4. Indikator SPM Perangkat Daerah
BKPSDM Kota Madiun tidak mengampu indikator SPM
5. Indikator LPPD yang di ampu
 - a. Penjelasan
 - Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga Kesehatan)
 - Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
 - Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
 - b. Rumus perhitungan
 - Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan tinggi ke atas/Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
 - Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)/Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
 - Jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun

No	Uraian Indikator	Indikator					Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	tahun n-2	tahun n-1	tahun n	tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	√	√	-	-	26	26.85	27	27	29.18	-	27	27	tercapai
2.	Indeks Sistem Merit		√				190	220	250	250	266	-	250	250	tercapai
3.	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai PP 11 Thn 2017 (20JP/orang/tahun)	-	√	√	-	-	33%	35%	37%	37%	36.26%	-	37%	37%	melebihi target
4.	Persentase peningkatan kompetensi ASN	-	-	√	-	-	33%	-	-	-	51.29%	-	-	-	melebihi target
5.	Persentase perencanaan ASN sesuai dengan kebutuhan	-	-	√	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	tercapai
6.	Persentase kesesuaian usulan pengadaan sesuai dengan jumlah formasi yang	-	-	√	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	tercapai

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

	dibutuhkan														
7	Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	-	-	√	-	-	25.5%	-	-	-	31.62%	-	-	-	melebihi target
8	Persentase penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan SKJ	-	-	√	-	-	50%	60%	70%	70%	63.22%	-	70%	70%	melebihi target
9	Persentase penilaian kinerja pegawai dengan hasil baik	-	-	√	-	-	95%	-	-	-	100%	-	-	-	melebihi target
10	Persentase sasaran kinerja pegawai ASN yang bernilai baik (lebih dari 75)	-	-	√	-	-	90%	90%	90%	90%	100%	-	90%	90%	melebihi target
11	Persentase terpenuhinya penggajian, penghargaan sesuai dengan aturan yang berlaku	-	-	√	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	tercapai
12	Persentase pelanggaran disiplin ASN	-	-	√	-	-	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.12%	-	0.25%	0.25%	tercapai
13	Persentase data kepegawaian yang mutakhir	-	-	√	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	tercapai

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

14	Tercapainya pelayanan pemberhentian PNS	-	-	√	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	tercapai
----	---	---	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---	------	------	----------

Dilihat berdasarkan tabel capaian kinerja pelayanan diatas terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan situasi serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian Perangkat Daerah yaitu :

1. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai PP 11 Thn 2017 (20JP/orang/tahun)
2. Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi
3. Persentase penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan SKJ
4. Persentase penilaian kinerja pegawai dengan hasil baik
5. Persentase sasaran kinerja pegawai ASN yang bernilai baik (lebih dari 75)

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

Tabel 2.2.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)						
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	√	-	-	-	-	Meningkatkan kinerja OPD
2.	Indeks Sistem Merit	-	√	-	-	-	Terdapat dokumen yang belum ada	Mencukupi dokumen-dokumen pendukung
3.	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai PP 11 Thn 2017 (20JP/orang/tahun)	-	-	√	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran - Masih kurangnya pelatihan atau diklat fungsional - Masih banyak ASN yang belum berkompetensi di bidangnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Bimtek secara online - Diadakanya Diklat atau Bimtek peningkatan kompetensi - Perlu adanya seleksi untuk ASN yang berkompetensi
4.	Persentase peningkatan kompetensi ASN	-	-	√	-	-	Indikator lama	Indikator lama
5.	Persentase perencanaan ASN sesuai dengan kebutuhan	-	-	√	-	-	Formasi ASN terbatas pada PPPK	Adanya peta jabatan dan formasi
6.	Persentase kesesuaian usulan pengadaan sesuai	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan kualitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan dengan cara rekrutmen dan

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

	dengan jumlah formasi yang dibutuhkan							seleksi - Pemetaan pegawai sesuai dengan peta jabatan
7.	Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	-	-	√	-	-	Indikator lama	Indikator lama
8.	Persentase penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan SKJ	-	-	√	-	-	- Belum semua pegawai ditempatkan pada posisi jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya - Kurangnya strata pendidikan dan kompetensi pegawai	- Seluruh jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi jabatan - Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja
9.	Persentase penilaian kinerja pegawai dengan hasil baik	-	-	√	-	-	Indikator lama	Indikator lama
10.	Persentase sasaran kinerja pegawai ASN yang bernilai baik (lebih dari 75)	-	-	√	-	-	- Saran dan prasarana yang kurang memadai - Kurangnya sosialisasi - Kurangnya monitoring dan evaluasi bagi ASN - Kurangnya motivasi kerja dan distribusi pekerjaan terhadap ASN	- Diadakannya pelatihan/Bimtek - Motivasi pegawai - Distribusi pekerjaan sesuai kemampuan - Diadakannya monitoring dan evaluasi kerja bagi ASN - Memberikan motivasi kerja kepada ASN oleh OPD - Memberikan kompensasi atau insentif
11.	Persentase terpenuhinya penggajian, penghargaan sesuai	-	-	√	-	-	Rutin	Rutin

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

	dengan aturan yang berlaku							
12.	Persentase pelanggaran disiplin ASN	-	-	√	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran diri dari ASN tentang disiplin di dalam peningkatan kerja - Kurangnya pembinaan dari atasan - Kurang tegasnya sanksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kepatuhan ASN terhadap peraturan - Adanya sosialisasi mengenai kedisiplinan sehingga semakin berkurang ASN yang melakukan pelanggaran disiplin
13.	Persentase data kepegawaian yang mutakhir	-	-	√	-	-	Sarana dan prasarana kurang mendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya SDM yang berkualitas dan kompeten dalam mengolah data kepegawaian - Aplikasi SIMPEG
14.	Tercapainya pelayanan pemberhentian PNS	-	-	√	-	-	-	Aplikasi SIMPEG

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan hasil Indeks Kepuasan masyarakat pada Perangkat Daerah Tahun sebelumnya mendapatkan nilai indeks 87.22 dengan kriteria baik dengan unsur nilai 3 (tiga) terendah berada pada unsur :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana
2. Kesesuaian hasil pelayanan
3. Kemudahan Pengaduan, Konsultasi, dan Informasi tatap muka

Secara garis besar berikut beberapa isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Madiun pada tahun 2024/2025, antara lain :

1. Peningkatan Penerapan Sistem Merit;
2. Optimalisasi Pengembangan Kompetensi;
3. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi ASN;
4. Tindak Lanjut Penataan ASN sesuai Status Peta Jabatan.

1. Peningkatan Penerapan Sistem Merit

Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah bernilai baik yaitu mendapatkan nilai 295 poin. Namun perlu dilakukan aksi untuk mengoptimalkan penerapan sistem merit pada Pemerintah Kota Madiun, salah satunya dengan optimalisasi pelaksanaan sistem merit pada Pemerintah Kota Madiun sebagai bentuk penerapan penerapan sistem merit harus sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

2. Optimalisasi Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur di Kota Madiun belum berjalan optimal. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dan optimalisasi pembuatan kebijakan internal penataan SDM, pembangunan sistem informasi SDM serta optimalisasi kompetensi dalam rangka menunjang manajemen talenta.

3. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi ASN

Dalam upaya Peningkatan Administrasi Kepegawaian perlu menyediakan data dan informasi kepegawaian daerah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

kebijakan Satu Data sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019. Pemerintah Kota Madiun telah memiliki Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dalam peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian serta pelayanan administrasi kepegawaian namun masih perlu pengembangan serta dukungan pendanaan melalui anggaran yang memadai.

Untuk itu SIMPEG diharapkan dapat mencakup layanan kepegawaian secara digital untuk pelayanan administrasi kepegawaian BKPSDM Kota Madiun meliputi :

1. Pelayanan Data Pegawai;
 2. Pelayanan Pensiun ASN;
 3. Pelayanan Kenaikan Pangkat ASN;
 4. Pelayanan Mutasi Pindah ASN;
 5. Pelayanan Pemberian / Pengajuan Cuti ASN;
 6. Pelayanan Penugasan ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
 7. Pelayanan Penerbitan Kartu Pegawai ASN dan Kartu Suami/Kartu Istri ASN;
 8. Pelayanan Pengurusan Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Pengakuan gelar;
 9. Pelayanan Administrasi Lainnya di Bidang Kepegawaian.
4. Tindak lanjut Penataan ASN sesuai Status Peta Jabatan

Menteri PAN dan RB mengeluarkan Surat Edaran nomor B/165/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mewajibkan status kepegawaian di instansi pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selaras dengan hal di atas maka untuk Tahun 2026 terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta OPD terkait lainnya :

- a. Melakukan pemetaan pegawai non-ASN di Lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK;
- b. Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di Lingkungan Instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai Non-ASN:

- c. Dalam hal Instansi Pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui Tenaga Alih daya (*outsourcing*) oleh pihak ketiga dan sattu Tenaga Alih daya (*outsourcing*) tersebut bukan merupakan Tenaga Honorer pada instansi yang bersangkutan;
- d. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai Non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu ditetapkan.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu :

Tabel 2.3
Permasalahan dan Hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Madiun

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Hambatan
1	Pelayanan Sewa gedung kantor	penyewa gedung kurang menaati SOP	Dapat mengakibatkan keterlambatan laporan pendapatan
2	Pelayanan Permohonan Izin Tugas Belajar	Berkas permohonan kurang lengkap	Akreditasi prodi yang belum terbit/habis masa berlaku
3	Pelayanan Permohonan Tugas Belajar	Berkas permohonan kurang lengkap	Akreditasi prodi yang belum terbit/habis masa berlaku
4	Pelayanan Permohonan Mengikuti Diklat Teknis Keluar Daerah	Jadwal penyelenggaraan yang belum jelas	Jumlah peserta belum terpenuhi satu kelas
5	Pelayanan permohonan Bantuan Biaya Pendidikan (B2P)	Belum semua permohonan B2P terpenuhi	Anggaran yang tersedia belum mencukupi seluruh permohonan
6	Pelayanan Permohonan Penyesuaian Gelar Pendidikan/Peningkatan Pendidikan	Berkas permohonan kurang lengkap	Aplikasi SI-ASN belum optimal digunakan
7	Pelayanan Permohonan	Berkas permohonan	Program studi

	Surat Keterangan yang berfungsi sama dengan Izin Tugas Belajar	kurang lengkap	tidak linier
8	Pelayanan Kenaikan Pangkat	Berkas usulan tidak lengkap/ Salah unggah	Dokumen yang diunggah di SIMPEG tidak update
9	Pelayanan Pindah Instansi	Berkas permohonan tidak lengkap	Kontak person tidak dicantumkan
10	Pelayanan Karis/ Karsu	Karis /Karsu tidak jadi / batal	Dokumen yang diupload tidak lengkap/ kurang
11	Pelayanan Satya Lencana Karya Satya	Piagam tidak jadi	Kesalahan penulisan saat input data/ tidak lengkap
12	Pelayanan Kenaikan Jenjang JF	Berkas usulan : - Terlambat - Berubah - ubah - Dokumen pendukung tidak lengkap	PNS yang sudah diusulkan diusulkan lagi

Dampak Permasalahan dan hambatan dalam pencapaian :

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Kendala-kendala pelayanan yang disebutkan di atas seluruhnya dapat ditangani dengan baik, sehingga walaupun ada kendala namun tidak mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Madiun.

2. Terhadap Capaian Program Nasional (SPM, SDGs)

Kendala-kendala pelayanan di BKPSDM Kota Madiun tidak secara langsung mempengaruhi Program SDG's, karena Program SDG's lebih menekankan pada manajemen ASN dan dipengaruhi oleh inisiatif ASN untuk meningkatkan strata pendidikannya.

Tantangan dan Peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat daerah :

Tabel 2.3.1
Tantangan dan Peluang peningkatan pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Madiun

No	Jenis Pelayanan	Tantangan	Peluang
1	Sewa Gedung Diklat	Perlu optimalisasi aplikasi yang menangani jadwal	Diadakannya sistem aplikasi sewa gedung diklat yang

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

		sewa gedung sekaligus pengelolaan administrasi	komprehensif
2	Pelayanan permohonan Izin Tugas Belajar	Penerbitan Surat Keputusan Izin Tugas Belajar secara cepat	Penerapan Aplikasi SIMPEG dalam pengajuan permohonan Izin Tugas Belajar
3	Pelayanan Permohonan Tugas Belajar	Penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar secara cepat	Penerapan Aplikasi SIMPEG dalam pengajuan permohonan Tugas Belajar
4	Pelayanan Permohonan Mengikuti Diklat Teknis Keluar Daerah	Seluruh pemohon dapat mengikuti Diklat Teknis	Ketersediaan Anggaran dan kesesuaian jadwal Diklat Teknis
5	Pelayanan Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan (B2P)	Seluruh pemohon dapat menerima Bantuan Biaya Pendidikan	Ketersediaan anggaran yang cukup memadai
6	Pelayanan Permohonan Penyesuaian Gelar Pendidikan/Peningkatan Pendidikan	Aplikasi SI-ASN dapat digunakan dengan cepat dan lancar	Koordinasi secara berkelanjutan dengan Kanreg II BKN Surabaya
7	Pelayanan permohonan Surat Keterangan yang berfungsi sama dengan Izin Tugas Belajar	Penerbitan Surat Keterangan yang berfungsi sama dengan Izin Tugas Belajar secara cepat	Penerapan Aplikasi SIMPEG dalam pengajuan permohonan Surat Keterangan yang berfungsi sama dengan Izin Tugas Belajar

Isu Penting serta rekomendasi dan catatan yang strategis dalam menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas :

1. Isu Penting

- a. Peningkatan Penerapan Sistem Merit
- b. Optimalisasi Pengembangan Kompetensi
- c. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi ASN
- d. Tindak Lanjut Penataan ASN sesuai status Peta Jabatan

2. Rekomendasi Catatan

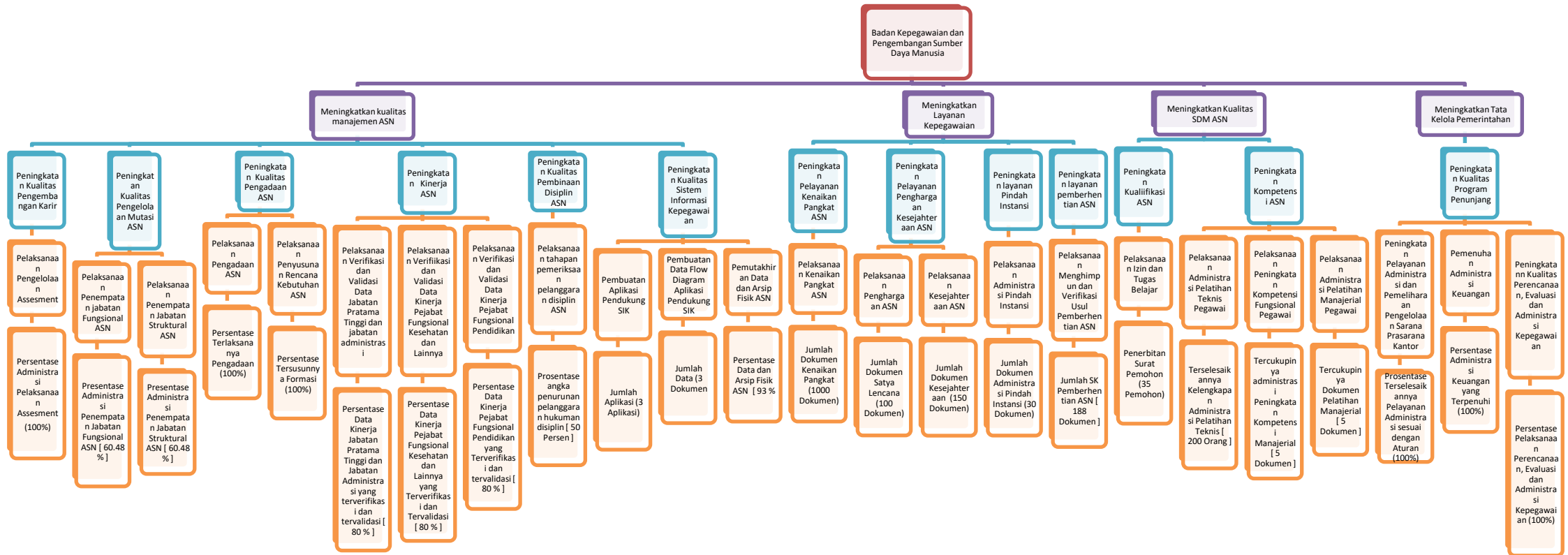
Tidak ada

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diambil dari Renstra Perangkat daerah pada Tahun Berkenaan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa kebutuhan didasarkan pada evaluasi kinerja Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan dan identifikasi isu – isu penting yang telah dibagikan dalam bentuk Pohon Kinerja Perangkat Daerah.

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

Gambar 2.4
POHON KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Madiun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BKPSDM	Nilai Akuntabilitas Kinerja	85.4	7.264.270.020	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BKPSDM	Nilai Akuntabilitas Kinerja	85.4	7.264.270.020	
2.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	BKPSDM	persentase pemenuhan dokumen Penganggaran dan Evaluasi	100%	9.400.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	BKPSDM	persentase pemenuhan dokumen Penganggaran dan Evaluasi	100%	9.400.000	
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	9.400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	9.400.000	
4.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	4.024.709.623	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	4.024.709.623	
5.	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	4.024.709.623	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	4.024.709.623	
6.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	340.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	340.000.000	
7.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	85 Laporan	340.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	85 Laporan	340.000.000	

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

			Konsultasi SKPD			Konsultasi SKPD		dan Konsultasi SKPD			
8.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD	100%	50.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD	100%	50.000.000	
9.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	50.000.000	
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	100%	2.655.160.397	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	100%	2.655.160.397	
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.655.160.397	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.655.160.397	
12	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	185.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	185.000.000	
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	35.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	35.000.000	
14	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	100.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	100.000.000	
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	BKPSDM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	8 Unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	BKPSDM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	8 Unit	50.000.000	

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
16	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	100%	1.847.304.600	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	100%	1.847.304.600	00
17	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	100%	1.093.590.200	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	100%	1.093.590.200	00
18	Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	934.230.200	Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	934.230.200	
19	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	225 Dokumen	89.360.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	225 Dokumen	89.360.000	
20	Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	70.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Laporan	70.000.000	
21	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	100%	345.746.200	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	100%	345.746.200	0
22	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	376 Dokumen	275.116.200	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	376 Dokumen	275.116.200	
23	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	380 Dokumen	70.630.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	380 Dokumen	70.630.000	

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

24	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi	100%	100.000.000	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi	100%	100.000.000	0
25	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	290 Orang	100.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	290 Orang	100.000.000	
26	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	100%	307.968.200	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	100%	307.968.200	0
27	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	20.000.000	
28	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	42.846.200	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	42.846.200	
29	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60 Orang	245.122.000	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60 Orang	245.122.000	
30	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	60%	2.423.980.380	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	60%	2.423.980.380	80
31	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	100%	1.533.980.380	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	100%	1.533.980.380	80
32	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	232 Orang	1.533.980.380	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	232 Orang	1.533.980.380	80

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

33	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	80%	890.000.000	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	80%	890.000.000	0
34	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	186 orang	890.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	186 orang	890.000.000	

Berdasarkan tabel hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah tidak ditemukan perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD. Dengan demikian analisis kebutuhan Perangkat Daerah telah sinkron dengan Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam upaya untuk mengakomodir usulan masyarakat maka diperlukan sumber pendanaan selain APBD Kota Madiun, yaitu APBD Provinsi maupun APBN. Usulan-usulan masyarakat yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan atau APBN harus disertai data dukung dan telah di verifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Madiun

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Perkiraan Kebutuhan Anggaran	Usulan Sumber Pendanaan (APBD Prov / BK Prov/ APBN / DAK / DBHCHT / Lainnya (sebutkan))	Penjelasan dikaitkan dengan isu penyelenggaraan sesuai Tupoksi / Isu Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BKPSDM				Program Pendukung/Rutin
2.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi	BKPSDM				Program Pendukung/Rutin
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	5 Dokumen	9.400.000	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Program Pendukung/Rutin
4.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	BKPSDM				Program Pendukung/Rutin
5.	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	45 Orang	4.024.709.623	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Program Pendukung/Rutin
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	BKPSDM				Program Pendukung/Rutin

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	85 Laporan	340.000.000	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Program Pendukung/Rutin
8	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD	BKPSDM				Program Pendukung/Rutin
9	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BKPSDM	5 Unit	50.000.000	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Program Pendukung/Rutin
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	BKPSDM				Program Pendukung/Rutin
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	12 Laporan	2.655.160.397	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Program Pendukung/Rutin
12	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	BKPSDM				Program Pendukung/Rutin
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKPSDM	18 Unit	35.000.000	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Program Pendukung/Rutin
14	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	BKPSDM	2 Unit	100.000.000	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Program Pendukung/Rutin

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

	Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitas					
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	BKPSDM	8 Unit	50.000.000	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Program Pendukung/Rutin
16	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	BKPSDM				Sistem Merit
17	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	BKPSDM				Sistem Merit
18	Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	BKPSDM	1 Laporan	934.230.200	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Sistem Merit
19	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	225 Dokumen	89.360.000	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Sistem Merit
20	Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	1 Laporan	70.000.000	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Sistem Merit
21	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	BKPSDM				Sistem Merit
22	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM	376 Dokumen	275.116.200	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Sistem Merit

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

23	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	380 Dokumen	70.630.000	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Sistem Merit
24	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi	BKPSDM				Sistem Merit
25	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM	50 Orang	100.000.000	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Sistem Merit
26	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	BKPSDM				Sistem Merit
27	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	2 Dokumen	20.000.000	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Sistem Merit
28	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	BKPSDM	200 Orang	42.846.200	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Sistem Merit
29	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM	60 orang	245.122.000	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Sistem Merit
30	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	BKPSDM				Peningkatan Kapasitas SDM
31	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	BKPSDM				Peningkatan Kapasitas SDM
32	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	BKPSDM	232 Orang	1.533.980.380	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kapasitas SDM

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

	Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						
33	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	BKPSDM				Peningkatan Kapasitas SDM
34	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	186 Laporan	890.000.000	Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kapasitas SDM

Catatan : tabel untuk usulan APBD Provinsi maupun APBN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan Nasional sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam kerangka pembangunannya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara operasional termasuk dalam bidang kepegawaian yang tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Adapun program nasional yang terkait Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam urusan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah yang disinkronkan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dari Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan Telaahan strategis berdasarkan Rencana Strategis terhadap 2 (dua) kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2020 – 2024 yaitu : **”Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Dalam Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun 2019 – 2024 adalah Meningkatkan Tata Kelola Manajemen ASN. Beberapa unsur yang terkandung selaras dengan visi BKN yaitu Mewujudkan Aparatur yang Profesional dan Berintegritas.

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2020 - 2024 yaitu **“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong “**.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Dari Visi KEMENPAN dan RB tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Tujuan BKPSDM Kota Madiun telah sejalan dengan visi tersebut.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dari rancangan rencana kerja Tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Melakukan sinkronisasi dan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah yang akan dituangkan ke dalam RKA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2026;
- b. Melakukan sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemerintah Kota Madiun yang bersifat penting, mendesak untuk segera dilaksanakan dan langsung dirasakan oleh PNS dan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam rancangan RKP Tahun 2025;
- c. Mengembangkan dan memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan terhadap program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan pada tahun 2026.

Sasaran dari Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun rincian rancangan APBD.

Perumusan tujuan dan sasaran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Madiun Tahun 20256 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Madiun sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun

Tahun 2025-2026. Perumusan tujuan dan sasaran rencana kerja Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026
Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia
Kota Madiun

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (2026)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik	4.49
Meningkatkan kualitas manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	300
Meningkatkan Layanan Kepegawaian	IKM	87,2
Meningkatkan Kualitas SDM ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	60%

3.3. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang ada di Daerah, sehingga perlu merumuskan apakah Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan mendukung pencapaian diantaranya :

1. Program Kepegawaian Daerah
 - a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 1. Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
 2. Sub Kegiatan koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
 - b. Kegiatan Mutasi dan Promosi
 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Muatsi ASN
 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Assesment
 - d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penialian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi pegawai
 3. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum
 - b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan mendukung pencapaian target
Kota Madiun

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
2.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	5 Dokumen
4.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	45 ASN
6.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
7.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	85 Laporan
8.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
9.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	12 Unit
10.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

	Daerah					
11.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	12 Laporan
12.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
13.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	18 Unit
14.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	2 Unit
15.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	8 Unit
16.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
17.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					
18.	Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	-	1 Laporan	-	-	-
19.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-	-	-	-	225 Dokumen
20.	Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	1 Laporan
21.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN					
22.	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	-	376 Dokumen	-	-	-

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

23.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-	-	-	-	380 Dokumen
24.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN					
25.	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	-	-	-	-	290 Orang
26.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
27.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	-	2 Dokumen
28.	Sub Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	-	-	-	-	200 Orang
29.	Sub Pembinaan Disiplin ASN	-	-	-	-	60 orang
30.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
31.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis					
32.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	-	232 Orang	-	-	-
33.	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					
34.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	-	-	-	-	186 Laporan

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

	Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					
--	---	--	--	--	--	--

Kolom faktor merupakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, yang merupakan kegiatan rutin di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dari hasil identifikasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diampu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka pada Tahun 2026 usulan yang diajukan dalam Renja Perangkat Daerah :

1. Jumlah Usulan :

- a. Program : 3 Program
- b. Kegiatan : 12 Kegiatan
- c. Sub Kegiatan : 19 Sub Kegiatan
- d. Pagu Anggaran : Rp. 11.535.555.000,-
- e. Sumber Pendanaan :
- f. APBD : Rp. 11.535.555.000,-
 - i. APBD PROV : Rp. -
 - ii. APBN : Rp. -
 - iii. Lainnya : Rp. -
- g. Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Madiun
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)					(2)		(13)	(14)		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5	3				KEPEGAWAIAN					
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A	Skor	7.264.270.020,00	
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi	100	%	9.400.000,00	
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dokumen	9.400.000,00	
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100	%	4.024.709.623	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang	4.024.709.623	
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi	100	%	340.000.000,00	

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

						umum				
5	3	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	Laporan	340.000.000,00	
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD	100	%	50.000.000,00	
5	3	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	50.000.000,00	
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	100	%	2.655.160.397,00	
5	3	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.655.160.397,00	
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	185.000.000,00	
5	3	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	Unit	35.000.000,00	
5	3	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	100.000.000,00	
5	3	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	50.000.000,00	

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	IKM	87.2	Skor	1.847.304.600,000	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	100	%	1.093.590.200,00	
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1	Laporan	934.230.200,00	
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	225	Dokumen	89.360.000,00	
5	3	2	2.01	11	Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan sistem Informasi Kepegawa	1	Laporan	70.000.000,00	
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	100	%	345.746.200,00	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	376	Dokumen	275.116.200,00	
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	380	Dokumen	70.630.000,00	
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan kompetensi	100	%	100.000.000,00	
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	50	Orang	100.000.000,00	
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Realisasi Evaluasi Kinerja	100	%	307.968.200,00	
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	2	Dokumen	20.000.000,00	

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

					Aparatur					
5	3	2	2.0 4	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200	Orang	42.846.200,00	
5	3	2	2.0 4	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60	Orang	245.122.000,00	
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan SDM	60	%	2.423.980.380,00	
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi Teknis	100	%	1.533.980.380,00	
5	4	2	2.0 1	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	232	Orang	1.533.980.380,00	
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Syarat Kompetensi Jabatannya	100	%	890.000.000,00	
5	4	2	2.0 2	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	186	Orang	890.000.000,00	

Catatan : format E-KAK

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Madiun menetapkan Prioritas Pemerintah Daerah yang harus didukung dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Prioritas Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2026 adalah :

1. Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City
2. Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
3. Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusifitas Sosial
4. Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Adapun BKPSDM Kota Madiun mendukung pada Prioritas Pemerintah Daerah **Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City** untuk kemudian dukungan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan dukungan Visi, Misi Kota Madiun di bidang kepegawaian serta tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan, disusun rencana kerja tahun 2025 dan menguraikan dalam 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 12.142.686.668 ,- (Dua Belas Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) yang berasal dari APBD Kota Madiun, dengan uraian sebagai berikut :

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026
Kota Madiun
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catat an Penti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Hasil (Sasaran)	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n (Sasaran)				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4	1														
					PENDAPATAN ASLI DAERAH										
4	1	02	01	000 3	Retribusi Penyewaan Bangunan		Persentas e realisasi pendapat an			100.000. 000					100.000. 000
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	3				KEPEGAWAIAN										
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										7.264.27 0.020
5	3	1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IPP	85.4	100%	5	4.49	9.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan	5	9.400.000
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		85.4	100%	45	4.49	6.275.394.183	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah ASN	45	4.024.709.623
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		85.4	100%	85	4.49	340.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan	85	340.000.000

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

								si SKPD											
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
5	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	85.4	100%	5	4.49	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit	5	50.000.000	
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85.4	100%	12	4.49	317.979.637	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan	12	2.655.160.397	
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Nilai SAKIP	Persentase pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	85.4	100%	18	4.49	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Kendaraan	18	35.000.000	

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

					Dinas Jabatan		Barang Milik Daerah	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							Umum				
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	85.4	100%	2	4.49	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor	2	100.000.000	
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	85.4	100%	8	4.49	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana	8	50.000.000	
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								1.862.558.400						
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN														
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Persentase Administrasi Kepegawaian yang	Persentase Realisasi Pengadaan, Pembehentian dan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	100%	100%	1	290	934.230.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan	1	934.230.200	

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

						Terselesaikan	Informasi													
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	Persentase Realisasi Pengadaan, Pembehentian dan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Indek Sistem Merit	100%	100%	225	290	89.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen	225	89.360.000	
5	3	2	2.01	11	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	Persentase Realisasi Pengadaan, Pembehentian dan Informasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan sistem Informasi Kepegawaian	Indek Sistem Merit	100%	100%	1	290	105.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan	1	70.000.000	
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN															
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Indek Sistem Merit	100%	100%	376	290	275.116.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen	376	275.116.200	

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Administrasi Kepegawain yang terselesaikan	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	Jumlah Pengelolan Kenaikan Pangkat ASN	Indek Sistem Merit	100%	100%	380	290	70.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen	380	70.630.000
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN													
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Persentase Administrasi Kepegawain yang terselesaikan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	Jumlah Dokumen Pengelolan Assessment Center	Indek Sistem Merit	100%	100%	50	290	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen	50	100.000.000
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Administrasi Kepegawain yang terselesaikan	Persentase Realisasi Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indek Sistem Merit)	100%	100%	2	290	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen	2	20.000.000
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase Administrasi Kepegawain yang terselesaikan	Persentase Realisasi Evaluasi Kinerja	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Indek Sistem Merit	100%	100%	200	290	22.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah ASN	200	42.846.200
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Administrasi Kepegaw		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaa	Indek Sistem Merit	100%	100%	60	290	245.372.000	Dana Transfer Umum-Dana	Jumlah ASN	60	245.122.000

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

						aian yang Terselesaikan		n Kedisiplinan							Alokasi Umum				
5	4					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
5	4	2				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								3.022.354.448					
5	4	2	2.01			Pengembangan Kompetensi Teknis													
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pengembangan SDM	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persentase Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi ASN	20%	100%	232	35%	2.117.354.448	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN	232	1.533.980.380
5	4	2	2.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional													
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Pengembangan SDM	Persentase ASN yang mengikuti Syarat Kompetensi Jabatannya	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Persentase Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi ASN	20%	100%	186	35%	905.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan	186	890.000.000

RENJA BKPSDM KOTA MADIUN TAHUN 2026

								Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan											
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sesuai Format SIPD RI

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah dilakukan pembahasan dan analisis kebutuhan dan memperhatikan isu-isu penting terkait pelayanan Perangkat Daerah. Forum Renja Perangkat Daerah juga mengakomodir usulan masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan bersama stakeholder terkait, usulan Pokok Pikiran DPRD, usulan Top Down, serta yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Berdasarkan kinerja tahun sebelumnya, arahan prioritas pembangunan dan Rencana Strategis maka Tujuan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 adalah Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Meningkatnya Kompetensi Aparatur.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun sebagai dokumen pendukung dan penyelarasan dokumen perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2026.

Madiun, Januari 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Madiun



NIP. 19660813 199203 1 009